

Pembangunan Multidimensi sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan

Noviyanti Listiyaningrum Universitas Gajah Mada, Indonesia

Abstract

Poverty consists of several dimensions—physical, geographical, power, and economy. The most commonly discussed poverty is economic poverty. The goal of MDGs in poverty-related SDGs is changed into 'no poverty'. This becomes a challenge in itself, so it is need to know the reality for its achievement. To create no poverty, there are many roles which are needed. Cooperation for multidimensional development and improvement is highly recommended. The poverty data of Bengkulu Province in 2007 to 2015 gives enough illustration that the number or percentage of poor people is fluctuating. Increasing the poor can also be caused by an increase in the poverty line. The solution offered is multidimensional development, started from human development. Human development is carried out by improving health, education, and worthy living standards. The worthy living standard is supported by economic development. Economic development is designed to be integrated between regions with each other so that each region is stimulated to develop local potentials respectively. To facilitate and support the economic movement, transportation network system will be created which pay attention to the form or shape of the region.

Keywords:

Pembangunan; Multidimensi; Pengentasan Kemiskinan

PENDAHULUAN

Kemiskinan dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu kemiskinan fisik atau kerentanan fisik, kemiskinan geografis, kemiskinan kekuasaan, dan kemiskinan ekonomi. Kemiskinan menurut BPS merupakan kondisi penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan menjadi batas kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, yang sekaligus menekankan bahwa kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan dari dimensi

ekonomi. Dimensi kemiskinan yang lebih banyak dibahas adalah dimensi ekonomi. Berbagai kebijakan telah disusun untuk mengentaskan kemiskinan. *Millenium Development Goals* (MDGs) poin pertama bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Oleh karena masa berlakunya MDGs berakhir, poin tersebut diperbarui pada *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs poin pertama tidak sekadar menanggulangi kemiskinan tetapi mengakhiri kemiskinan hingga tidak ada kemiskinan (*no poverty*) (UN, 2015). Tingginya harapan pencapaian SDGs bukan berarti mudah

untuk dilaksanakan, sehingga perlu diketahui realita dari kerangka idealita *no poverty*.

PEMBAHASAN

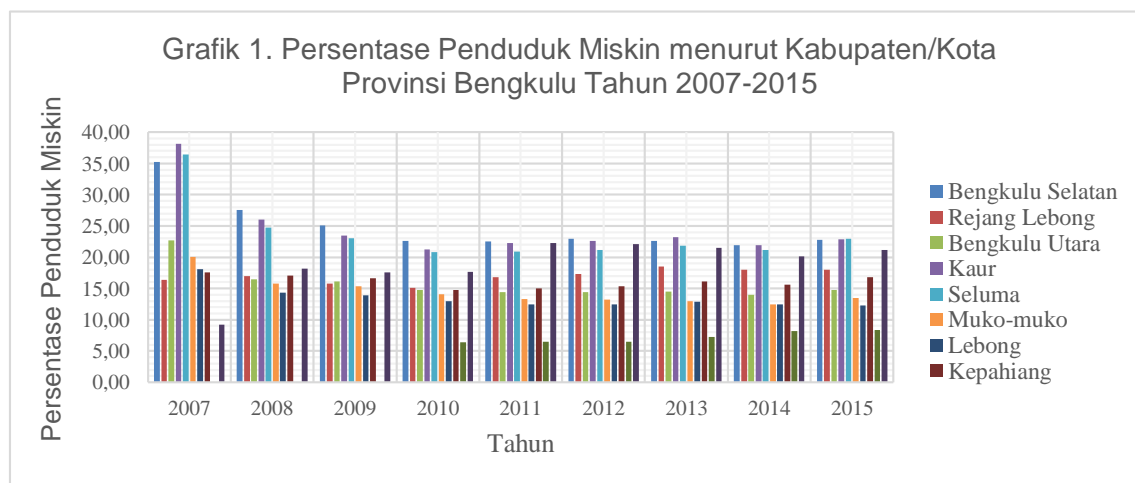
Pembangunan Multidimensi sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Bengkulu)

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensi. Berdasarkan *Multidimensional Poverty Index* (MPI), kemiskinan diukur melalui tiga indikator, yaitu: (1) dimensi kesehatan, yang meliputi sanitasi, air bersih, penolong persalinan, asupan gizi balita; (2) dimensi pendidikan, yang meliputi keberlangsungan pendidikan, melek huruf, akses layanan pendidikan prasekolah; dan (3) dimensi standar hidup yang meliputi sumber penerangan, bahan bakar/energi untuk memasak, atap lantai dan dinding, kepemilikan rumah. Kompleksitas dimensi kemiskinan mengisyaratkan bahwa

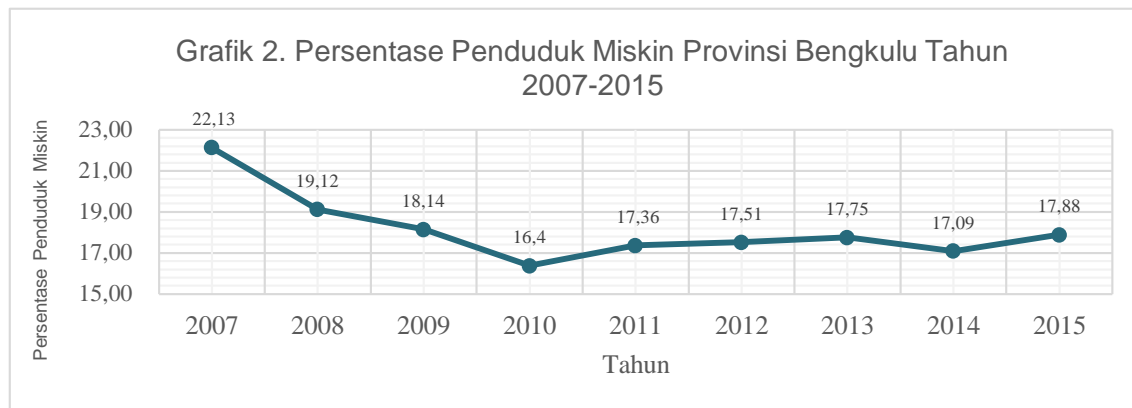
pengentasan kemiskinan membutuhkan perbaikan banyak dimensi oleh peran banyak pihak.

Pengentasan kemiskinan hingga mencapai *zero poverty* atau *no poverty* di tempat manapun tidak dapat dilaksanakan secara terpusat oleh satu pemeran. Indonesia memiliki kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Negara mendelagasikan daerah-daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri. Terkait dengan kemiskinan, daerah pun memiliki kekuasaan untuk mengurus pengentasan kemiskinan sehingga memunculkan optimisme pencapaian poin *no poverty* di dunia.

Keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak serta-merta dapat dilihat secara global, namun membutuhkan data regional bahkan lokal. Grafik 1 menyajikan persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu



Sumber: BPS, 2007-2015 (diolah).



Sumber: BPS, 2007-2015 (diolah).

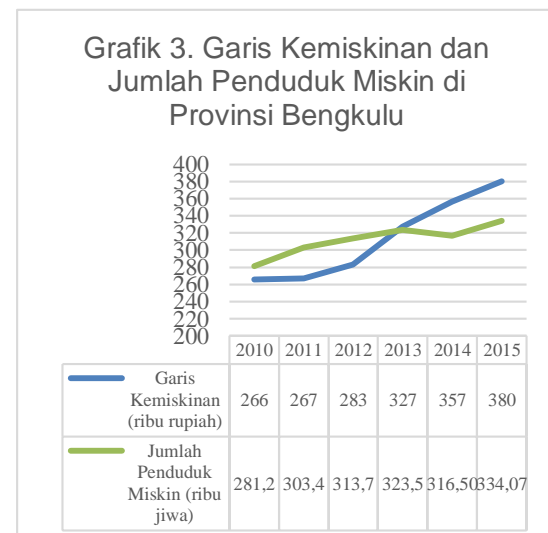
sedangkan Grafik 2 menyajikan persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu.

Gambar 1. Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu



Data kemiskinan per kabupaten/kota menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin tertinggi dari tahun ke tahun didominasi Kabupaten Bengkulu Selatan, Kaur, dan Seluma. Ketiga daerah berada di bagian tenggara. Meskipun demikian, perubahan signifikan berupa kecenderungan penurunan penduduk miskin dari tahun ke tahun terlihat

signifikan. Pada tahun 2015, ketiga kabupaten tersebut memiliki persentase penduduk miskin dengan tingkat mendekati Kota Bengkulu atau menuju rata-rata, sementara Kota Bengkulu



Sumber: BPS, 2007-2015 (diolah).

memiliki persentase penduduk miskin yang berubah dari tahun ke tahun dengan kecenderungan meningkat. Hal ini tidak lepas dari adanya peningkatan garis kemiskinan. Garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu disajikan pada Grafik 3.

Berdasarkan data kemiskinan multidimensional MPI, Provinsi Bengkulu

memiliki kemiskinan sebagai berikut. Indeks kemiskinan multidimensi Provinsi Bengkulu sebesar 0,120, masih di bawah angka nasional (0,124). Pada tahun 2012 terdapat 572.602 jiwa penduduk miskin multidimensi di Provinsi Bengkulu. Jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya jumlah penduduk miskin di provinsi ini turun sekitar 15,8 persen atau sekitar 107.737 jiwa. Pada saat yang sama, angka kemiskinan multidimensi turun sebesar 7,2 persen dan keparahan kemiskinan yang membaik sebesar 0,02 persen serta indeks kemiskinan turun menjadi 0,120 (MPI Indonesia, 2015).

Perbedaan kondisi kemiskinan di berbagai daerah menunjukkan kompleksitas kemiskinan. Salah satu upaya pengentasan kemiskinan adalah pembangunan. Pembangunan yang bertujuan mengentaskan kemiskinan tidak dapat mengabaikan pembangunan dimensi-dimensi kemiskinan. Pertama, kemiskinan geografis perlu memperhatikan bentuk wilayah dan variasi topografi. Kedua, kemiskinan kekuasaan perlu memanfaatkan otonomi daerah dan pemberdayaan gender, dalam hal ini adalah kekuasaan perempuan. Ketiga, dimensi fisik perlu ditunjang dengan fasilitas kesehatan yang memadai. Keempat, dimensi ekonomi, yaitu dengan

pembangunan ekonomi yang komprehensif. Pembangunan ekonomi tidak lepas dari pembangunan manusia.

Pembangunan manusia ialah melalui taraf kesehatan, pengetahuan, keterampilan, dan pemanfaatan kemampuan/keterampilan. Pembangunan manusia diukur dengan indeks pembangunan manusia atau IPM (*human development index*, HDI). Indikator yang tercakup di dalamnya adalah hidup sehat dengan umur panjang, akses pengetahuan, dan standar hidup. Hidup sehat direpresentasikan melalui angka harapan hidup. Akses pengetahuan direpresentasikan rerata tahun sekolah. Standar hidup direpresentasikan dengan konsumsi (GNI per kapita) (UNDP, 2015). Capaian pembangunan manusia diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI), yang berbasis komponen dasar kualitas hidup. Ukuran dasar kualitas hidup tersebut didekati dengan tiga dimensi dasar seperti yang dikemukakan oleh UNDP, yaitu dimensi umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak (BPS, 2015).

Kota Bengkulu memiliki IPM tertinggi di Provinsi Bengkulu. Hal ini disebabkan oleh topografi halus Kota Bengkulu atau

Tabel 1. IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bengkulu Selatan	65.84	66.5	66.77	67.61	68.28	68.57
Rejang Lebong	64.19	64.92	65.51	66.11	66.55	67.51
Bengkulu Utara	63.5	64.61	65.47	66.67	67.27	67.46
Kaur	61.39	61.85	62.32	63.17	63.75	64.47
Seluma	60.27	61.01	61.55	62.1	62.94	63.41
Mukomuko	62.95	63.71	64.16	64.79	65.31	65.77
Lebong	61.87	62.43	62.84	63.15	63.9	64.72
Kepahiang	62.6	63.44	63.86	64.44	65.22	65.45
Bengkulu Tengah	61.7	62.54	63.12	63.71	64.1	64.68
Kota Bengkulu	74.92	75.31	75.71	76.16	76.49	77.16
Provinsi Bengkulu	65.35	65.96	66.61	67.5	68.06	68.59
INDONESIA	66.53	67.09	67.7	68.31	68.9	69.55

Sumber: BPS, 2007-2015 (diolah).

dataran rendah-wilayah kepebisiran, sehingga pembangunan fisik mudah dilakukan. Penduduk pun mudah mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, dan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Wilayah selain Kota Bengkulu cenderung masih bersifat kedesaan, di samping topografinya yang relatif lebih kasar. Di bagian tengah Pulau Sumatera atau timur Provinsi Bengkulu terdapat kabupaten seperti Lebong, Rejang Lebong, dan Kepahiang yang rawan bencana gempa bumi akibat sesar mayor Sumatera/Semangko. Pembangunan fisik dan akses penduduk terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidup relatif lebih sulit. Hal ini juga disebabkan oleh distribusi barang dan

jasa umumnya diutamakan untuk wilayah kota daripada desa.

Tabel 1 menyajikan IPM kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dan Indonesia. IPM Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu yang mengikuti pola di Indonesia, yaitu mengalami peningkatan. Provinsi Bengkulu memiliki IPM di bawah rata-rata nasional. Provinsi Bengkulu menduduki peringkat 20 dari 34 pada tahun 2015. Provinsi Bengkulu dan kabupaten/kota di dalamnya termasuk IPM kelas sedang pada tahun 2015.

Setiap kabupaten/kota memiliki IPM yang bervariasi. Hal ini dapat muncul sebagai kesenjangan pembangunan manusia atau menunjukkan belum meratanya pembangunan. Hal ini dapat

dipelajari bahwa setiap daerah memiliki potensi dan ancaman masing-masing. Jika setiap daerah dirangsang oleh pembangunan, kecepatan respons pembangunan pun dapat berbeda. Salah satu bentuk kecepatan yang berbeda adalah laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) di kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.

PENUTUP

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang harus ditangani secara multidimensional. Diperlukan strategi pengentasan kemiskinan berbasis otonomi daerah, melalui pembangunan manusia atau peningkatan indeks pembangunan manusia. Taraf pendidikan dan kesehatan yang meningkat dapat meningkatkan taraf ekonomi atau standar hidup layak. Peningkatan ekonomi akan lebih bekerja jika memanfaatkan potensi lokal.

Salah satu pengenalan potensi lokal ialah analisis *location quotient* (LQ). Sebagai contoh, Kota Bengkulu memiliki sektor jasa sebagai sektor unggulan sehingga pembangunan didasarkan atas kinerja sektor jasa. Daerah-daerah lain sebaiknya saling mendukung. Daerah kabupaten-kabupaten yang bersifat kedesaan dengan sektor pertanian yang unggul diharapkan mampu menopang

kebutuhan pertanian (dasar) untuk kota. Daerah peralihan (kota-desa) dirancang untuk menjadi kawasan industri, yang memproses bahan dari kawasan pertanian (desa) untuk disalurkan ke kota. Hubungan antara kota dengan daerah di sekitarnya harus bersifat generatif atau mendukung kota.

Kasus yang terjadi pada Kota Bengkulu adalah daerah kabupaten di sekitarnya cenderung memiliki hubungan *enclave*. Kota seakan-akan terpisah dengan daerah di sekitarnya (Tarigan, 2010). Hal ini dapat disebabkan oleh pemekaran kabupaten baru dan preferensi kabupaten-kabupaten besar lainnya untuk bekerja sama dengan provinsi tetangga. Hubungan kota yang generatif dapat dibentuk melalui jaringan transportasi yang baik.

Bentuk wilayah Provinsi Bengkulu adalah *elongated region* (*long and narrow shape*) sehingga sulit untuk mengembangkan jalur transportasi darat, sementara jalur transportasi laut (Samudra Hindia) kurang berfungsi. Hayati (2007) menjelaskan bahwa bentuk wilayah seperti ini menyulitkan hubungan transportasi dan komunikasi wilayah sehingga menghambat pertumbuhan wilayah tersebut. Jaringan transportasi tetap dibutuhkan. Jaringan transportasi

yang berkembang selanjutnya dapat mempercepat perputaran arus barang dan jasa. Kegiatan ekonomi sektor primer, sekunder, dan tersier dapat berjalan dengan lancar sehingga pembangunan ekonomi terlihat dampaknya. Standar hidup layak dapat terpenuhi sehingga pendidikan dan kesehatan dapat terjamin. Harapan besar di akhir ialah adanya peningkatan indeks pembangunan manusia dan tercapai *no poverty*.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2015). *Konsep Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan*.
- BPS. (2015). *Penduduk Miskin Kabupaten/Kota, 2007-2015*.
- Hayati, S. & Yani, A. (2007). *Geografi Politik*. Bandung: Refika Aditama.
- MPI Indonesia. (2015). *Indeks Kemiskinan Multidimensi di Propinsi Bengkulu*.
- Tarigan, R. (2010). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- UNDP. (2015). *Millennium Development Goals and Beyond 2015*.
- UNDP. (2015). *Sustainable Development Goals*.
- UNDP. (2015). *Human Development Report*.